

Pemilihan Pemimpin dalam Islam dan Relevansinya dengan Demokrasi Modern: Studi Tematik Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kepemimpinan Modern

Abdul Syukkur

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Abdulsyukkur83@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the concept of leader selection from an Islamic perspective and its relevance to the practice of modern democratic systems. In the Qur'an, leadership is a task that must be carried out based on the principles of deliberation, justice, responsibility, and prioritizing the public interest. However, these principles have not been conceptualized explicitly and practically, leaving room for a technical and mechanical formulation of a system that can adapt to current developments. This research uses a qualitative, literature-based method with a thematic approach. This involves collecting Qur'anic verses that examine leadership principles and then analyzing them comprehensively to identify the basic concept of leader selection from a Qur'anic perspective. The results show that the Qur'an contains principles concerning the mechanism for selecting ideal leaders, such as deliberation, justice, trustworthiness, competence, and the principle of upholding the values of justice. These principles are relevant to democratic values in modern governance systems, such as active participation, freedom of expression, justice, and accountability. The implication is that this research can contribute to enriching the discourse on the relationship between Islamic teachings and democratic practices in the context of modern leadership.

Keywords: *Leader selection, Qur'anic values, thematic interpretation, modern democracy.*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji konsep pemilihan pemimpin perspektif ajaran Islam dan relevansinya dengan praktik sistem demokrasi modern. Dalam al-Qur'an, kepemimpinan merupakan tugas yang harus dilaksanakan berdasar pada prinsip musyawarah, berkeadilan, penuh tanggung jawab, dan mengedepankan masalah umum. Akan tetapi berbagai prinsip ini belum terkonsep secara eksplisit-praktis sehingga menyisakan ruang untuk memformulasikannya secara teknis-mekanistik suatu sistem yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis kepustakaan dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengumpulkan

ayat-ayat al-Qur'an yang mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan kemudian menganalisisnya secara komprehensif sehingga menemukan konsep dasar pemilihan pemimpin perspektif al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip mengenai mekanisme pemilihan pemimpin ideal seperti musyawarah, berkeadilan, amanah, kompeten, dan prinsip menegakkan nilai-nilai keadilan. Berbagai prinsip ini relevan dengan nilai-nilai demokratis dalam sistem pemerintahan modern seperti partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, adil, dan bertanggung jawab. Implikasinya, penelitian ini dapat berkontribusi memperkaya wacana relasi ajaran Islam dengan praktik demokrasi dalam konteks kepemimpinan modern.

Kata kunci: *Pemilihan pemimpin, Nilai-nilai Qur'ani, Tafsir tematik, Demokrasi modern.*

Prolog

Masyarakat modern lebih memilih sistem demokrasi dalam memilih pemimpin, karena sistem demokrasi dianggap sebagai sistem pemilihan dan pemerintahan terbaik dari semua sistem yang ada. Fenomena ini menjadikan umat Islam dilema dalam mengaplikasikan ajaran agamanya dalam memilih pemimpin di satu sisi, dan mengaplikasikan sistem demokrasi yang sesuai perkembangan zaman di sisi yang lain. Persimpangan keduanya masih sering terjadi saat-saat pemilihan pemimpin (presiden), sehingga, terjadi simpang-siur di masyarakat tentang keduanya, apakah ada jurang terjal antara pemilihan pemimpin secara Islami dengan pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi, atau keduanya memiliki korelasi dan relevansi yang berkesesuaian dalam penerapannya?

Jawaban dari simpang-siur yang terjadi di masyarakat ini yang menjadi tujuan adanya penelitian ini. Sementara penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh para akademisi, di antaranya oleh Mauizah Hasanah Simamora, dkk pada 2024 dengan judul analisis kriteria pemimpin dalam perspektif al-Qur'an. Kajian ini mengulas kriteria pemimpin ideal berdasar al-Qur'an seperti harus memiliki integritas,

bersifat adil, memiliki kecakapan intelektual dan spritual¹. Kajian yang hampir sama dilakukan oleh Rudi Iskandar (2025) yang menghasilkan beberapa prinsip pemerintahan Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, persatuan, dan kebebasan beragama². Demikian juga dengan studi yang dilakukan oleh Muhammad Hanif Abdillah Lubis (2025) yang membahas konsep kepemimpinan dalam Islam perspektif tafsir klasik³. Sementara kajian yang dilakukan oleh R. Ay. Dwi Sri Rizky, dkk lebih fokus prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang relevan dengan kepemimpinan pada era modern⁴. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh M Habib Alhabsyi (2025) yang mengkaji relevansi ayat-ayat politik al-Qur'an dengan tata kelola pemerintahan modern⁵.

Berbagai penelitian ini memberikan kontribusi sangat penting dalam memahami konsep kepemimpinan dalam Islam, hanya saja masih lebih fokus pada prinsip pemerintahan dan aspek kriteria pemimpin secara umum. Sementara kajian ini lebih fokus pada konsep pemilihan

¹ Mauizah Hasanah Simamora, Jelita Simbolon, and Lutfi Kurmia Wildani, "ANALISIS KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN : KAJIAN TEMATIK TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG PEMIMPIN IDEAL PENDAHULUAN Manusia Sebagai Makhluk Sosial , Tidak Dapat Hidup Sendiri . Dalam Kehidupannya , Manusia Senantiasa Berinteraksi Dengan Sesama," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran & Tafsir* 7, no. 2 (2024): 208–26, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>.

² Rudi Iskandar, "NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM : KAJIAN AYAT-AYAT AL- QUR ' AN TENTANG PRINSIP DAN TUJUAN KENEGARAAN The State from an Islamic Perspective : A Study of Qur ' Anic Verses o n The Principles and Objectives of State Governance," *Ta'limuna Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2025): 156–64.

³ Muhammad Hanif and Abdillah Lubis, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshyari," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii%0AKonsep>.

⁴ Adjeng Wulandari, Ananda Hierofani Ahmad, and Universitas Islam Bandung, "PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM AL-QUR'AN II R.," *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 7, no. 1 (2026): 1–16, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>.

⁵ M Habib Alhabsyi, "Relevansi Ayat-Ayat Politik Al- Qur ' an Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5620–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>.

pemimpin perspektif al-Qur'an dengan pendekatan tematik dan mengaitkannya dengan mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi modern, sehingga, hasil kajiannya tidak hanya mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dalam al-Qur'an tetapi mengkaji juga relevansi berbagai prinsip itu dalam praktik demokrasi kontemporer terkait pemilihan pemimpin. Perspektif baru dari kajian ini adalah kontribusi terhadap normativitas ajaran al-Qur'an dalam praktik politik modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian berikut, yaitu bagaimana konsep pemilihan pemimpin menurut al-Qur'an, apa kriteria pemimpin ideal menurut al-Qur'an, dan bagaimana relevansi konsep tersebut dalam praktik demokrasi modern. Asumsi sementara dari penelitian adalah pertama, bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang universal dan komprehensif tidak hanya membimbing penganutnya untuk aspek akidan dan ibadah saja, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip normatif mengenai tata cara berkehidupan sosial dan berpolitik. Oleh karenanya, ajaran tersebut bisa dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan konsep ideal perspektif Islam. Kedua, al-Qur'an memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan pemimpin yang ideal, sehingga perlu analisis tematik terhadap berbagai ayat yang berbicara tentang kepemimpinan itu agar muncul formulasi baku tentang kepemimpinan ideal perspektif al-Qur'an. Ketiga, ajaran al-Qur'an bersifat universal dan fleksibel sehingga berbagai konsep yang ditawarkan oleh al-Qur'an bisa praktis dalam berbagai bidang termasuk bidang politik dan kepemimpinan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan pendekatan tematik (maudhui). Dalam pendekatan tematik peneliti menentukan tema yaitu pemilihan pemimpin, kemudian mengumpulkan ayat-ayat tentang pemilihan pemimpin, melengkapinya dengan perangkat studi qur'an, menganalisis interpretasi

para mufassir mengenai berbagai ayat itu, lalu menyusun konsep qurani tentang kepemimpinan.

Sementara sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa al-Qur'an al-Karim dan sumber data sekunder berupa karya-karya tafsir, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya lainnya seperti buku yang mengkaji tentang kepemimpinan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pemilihan Pemimpin Menurut al-Qur'an Berlandaskan Musyawarah

Dalam ajaran Islam figur pemimpin memiliki peran yang sangat penting dan sentral, sehingga cara penentuannya juga memiliki beberapa kriteria di antaranya harus berlandaskan musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)

Artinya: Dan lebih baik bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang patuh kepada Allah akan melaksanakan shalat dengan cara yang paling sempurna, apabila mereka menghadapi suatu perkara yang perlu dibahas bersama, maka mereka saling bermusyawarah, Nabi Muhammad sendiri bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam beberapa urusan duniawi, sedangkan dalam urusan ibadah beliau tidak memusyawarahkannya. Berbeda dengan para sahabat yang saling bermusyawarah antara satu dengan yang lain tentang urusan ibadah. Masalah pertama yang dimusyawarahkan oleh para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah adalah tentang khilafah (pemimpin setelah Rasulullah) karena Nabi sendiri tidak menunjuk di

antara mereka siapa yang berhak menggantikan beliau, maka hasil musyawarah mereka menentukan Abu Bakar sebagai penggantinya⁶.

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau berperilaku lemah lembut terhadap mereka, seandainya engkau bersikap keras lagi kasar pasti mereka akan menjauh dari sisimu, maka dari itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai perkara penting. Setelah engkau membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk tetap bermusyawarah dengan kaum muslim meski hasil musyawarah tentang perang Uhud tidak sesuai harapan, yang salah bukan musyawarahnya tapi keteledoran dalam melanggar hasil musyawarah. Jadi perintah musyawarah tetap berlaku bagi siapa saja dalam menyelesaikan berbagai persoalan duniawi, seperti pemilihan pemimpin, masalah peperangan, dan berbagai masalah sosial atau politik lainnya⁷.

Kebebasan Berpendapat dan Memilih

Dalam memilih pemimpin sangat diperlukan kebebasan dalam berpendapat, menentukan pilihan, berargumentasi dalam menentukan pilihan, dan mendengarkan pendapat pihak lain dalam menentukan pilihan terbaiknya. Allah mengajarkan hal itu, ketika terjadi dialog antara

⁶ Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, I (Kairo: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1946). H. 50.

⁷ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, I (Kairo: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997). H. 71.

Allah dengan Malaikat tentang penunjukan khalifah (orang yang bertanggungjawab) untuk memakmurkan bumi dan memberikan amanah itu kepada manusia (Adam).

Allah adalah pencipta, sementara Malaikat adalah makhluk, dari segi kekuasaan dan kekuatan jelas tidak bisa dibandingkan, tapi dalam penunjukan khalifah di bumi, Allah memberikan kesempatan kepada Malaikat untuk mengemukakan argumentasinya tentang siapa yang lebih layak untuk mengemban amanah itu.

Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa Aku menjadikan di bumi seorang khalifah, para malaikat berkata, “Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami bertasbih (menyucikan-Mu), memuji-Mu, dan menyucikan-Mu. Allah berfirman, sesungguhnya Aku Mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Setelah terjadi dialog, Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah (perwakilan Allah) di bumi untuk melaksanakan ketentuan Allah di dalamnya, mengajarkan berbagai ketentuan syariat dan hukum-hukum-Nya, termasuk juga tentang norma-norma keduniaan lainnya. Maka, makna khalifah bisa mencakup banyak hal yang berkaitan dengan berbagai pengistimewaan seseorang terhadap orang lain ⁸.

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: al-Haiyah al-Mishriyah al-Amah li al-Kitab, 1990). H. 216.

Kesempatan Memilih Pemimpin Terbaik

Kebebasan memilih dan memberikan argumen terbaik dalam memilih pemimpin tidak cukup untuk mendapatkan pemimpin terbaik, keduanya harus didukung dengan kesempatan dan peluang yang terbuka untuk memilih pemimpin terbaik, sehingga pemimpin yang terpilih pun sudah teruji dan benar-benar kapabel. Allah telah mencontohkan hal ini dalam firman-Nya dalam menentukan Nabi Dawud sebagai seorang Nabi sekaligus raja pada masanya

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)

Artinya: Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) dan ia melaksanakannya dengan sempurna, Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi seluruh manusia” Ibrahim berkata, “Aku minta juga dari sebagian keturunanku” Allah menjawab, “Doamu Aku kabulkan, tetapi janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Allah menunjuk Nabi Ibrahim menjadi imam (pemimpin) bagi manusia setelah Nabi Ibrahim sanggup melaksanakan tugasnya. Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah untuk menjadikan pemimpin dari anak keturunannya⁹. Permintaan ini tidak berniat nepotisme tapi berupa permohonan kepada Allah agar anak keturunannya juga baik seperti beliau dan pantas menjadi imam (pemimpin) bagi manusia yang lain.

⁹ Sayyid Thanthawi, *Tafsir Al-Wasith*, I (Kairo: Dar Nahdhah Misr, 1997). H. 266.

Kriteria Pemimpin Ideal Menurut al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki konsep tersendiri tentang kriteria pemimpin yang ideal, hal ini tertuang di beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang kepemimpinan, seperti dalam Surah al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya, jika kalian menentukan hukum kepada manusia maka putuskan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran terbaik kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisa [4]: 58).

Ayat ini menetapkan dua kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pertama harus orang yang amanah, kedua harus adil dalam memerintah atau memimpin umat manusia. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa perintah adil dalam ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada para umara' (pemimpin) yang mendapat amanah mengurus urusan orang banyak (manusia)¹⁰.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar, perintah untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya bersifat umum harus dilakukan siapa saja termasuk orang yang memiliki ilmu. Sementara berlaku adil mencakup dua hal, pertama berlaku adil dalam wilayah umum dan masalah hukum, kedua berlaku adil dalam memutus suatu perkara di antara dua orang yang bersengketa¹¹.

¹⁰ Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008). H. 87.

¹¹ Ridha, *Tafsir Al-Manar*. H. 139.

Menurut Syaikh Sayyid Quthb, perintah berbuat adil bersifat umum bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa melihat asal-usul ras maupun agamanya, semua mendapat perintah untuk berbuat adil¹².

Kriteria lain yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah harus bertanggung-jawab terhadap tegaknya kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak adil. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil, berbuat adillah karena perbuatan adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. (QS. Al-Maidah [5]: 8).

Menurut Syaikh Sya'rawi, ayat ini berisi perintah kepada orang-orang beriman untuk bertanggungjawab terhadap berbagai tugas dari Allah dan tugas bersama sesama manusia, penggunaan kata *qawwam* di sini menunjukkan bahwa pelaksanaannya harus bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, bukan hanya melaksanakan secara biasa dan yang penting selesai saja, tapi harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas itu¹³.

Demikian pula dengan pendapat Sayyid Thantawi, kata *qawwam* menurut beliau merupakan shighat mubalaghah dari kata *qaim* yang artinya melaksanakan suatu tugas dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan dengan cara terbaik¹⁴.

¹² Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, 17th ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992). H. 689.

¹³ Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*. H. 108.

¹⁴ Thantawi, *Tafsir Al-Wasith*. H. 72.

Kriteria lain yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah keteguhannya untuk selalu membela yang benar. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi Dawud yang menjadi model pemimpin yang baik.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

Allah berfirman kepada Dawud, Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan yang hak di antara manusia dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang sangat berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad [38]: 26).

Ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Dawud dengan mengingatkan bahwa Allah-lah memberikan kekuasaan kepada Nabi Dawud untuk menjadi pemimpin bagi manusia sehingga ia harus diikuti dan dipatuhi perintahnya, kemudian Allah mengingatkan Nabi Dawud untuk menegakkan keadilan keadilan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah 15.

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya, ayat ini menegaskan kenabian dan kepemimpinan (menjadi raja) Nabi Dawud atas Bani Israil, kemudian Allah memerintahkan Nabi Dawud untuk memerintah secara benar dan sesuai dengan ketentuan Allah, jika suatu kerajaan (pemerintahan) berjalan sesuai syariat Allah yang haq maka akan tersebar kemaslahatan di seluruh penjuru alam dan terbuka pula pintu-pintu kebaikan dengan cara yang terbaik. Sebaliknya, jika suatu pemerintahan dijalankan sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan demi kepentingan duniawi pejabatnya saja, maka mudharatnya (bahaya) sangat

¹⁵ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. H. 112.

besar dan bisa menjurus pada kehancuran alam, karena pemimpin seperti ini akan menjadikan rakyat sebagai tameng dari keserakahannya¹⁶.

Relevansi Konsep Kepemimpinan Qur'ani dengan Praktik Demokrasi Modern

Berbagai prinsip kepemimpinan Qurani ini sebagaimana dipaparkan di atas seperti musyawarah, kebebasan berpendapat, terbukanya kesempatan memilih pemimpin terbaik, amanah, adil, bertanggungjawab, dan membela yang haq,¹⁷ sejalan dan sangat relevan dengan praktik demokrasi modern yang memiliki prinsip keterbukaan komunikasi, kompeten, keadilan, partisipasi aktif, bertanggungjawab, dan menghargai keberagaman¹⁸.

Prinsip musyawarah yang dianjurkan oleh al-Qur'an sebagai sarana untuk memberikan kesempatan berpartisipasi aktif dalam segala hal, termasuk dalam bidang politik suatu pemerintahan, sehingga setiap rakyat bisa memberikan suaranya dalam memilih pemimpin terbaiknya. Bahkan, tidak hanya bisa berpendapat, tapi juga memberikan kesempatan untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain yang dianggap mampu dalam mengemban amanah sebagai pemimpin¹⁹. Dalam melaksanakan musyawarah tidak ada batasan pembahasan antara yang bisa dikaji dengan yang tidak bisa dikaji, terutama untuk masalah duniawi yang tercakup dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain

¹⁶ Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.). H. 316.

¹⁷ Fatkhiyatus Su et al., "Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam Politik Islam Di Indonesia PENDAHULUAN Demokrasi Telah Lama Menjadi Fondasi Penting Dalam Struktur Politik Dan Sosial Di Banyak Negara Barat , Terlebih Di Indonesia Yang Berasas Pancasila . Demokr," *Syariah Journal of Fiqh Studies* 0, no. 0 (2024): 178–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.61570/syariah>.

¹⁸ Ilham Bastanta Panjaitan et al., "ISLAM DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAUDHU' I," *ALMAHER Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75, <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31> ISLAM.

¹⁹ Muhammad Taufik and Ardillah Abu, "Islam Dan Demokrasi," *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (n.d.): 1–14.

sebagainya²⁰. Pembatasannya hanya apakah persoalan itu menjadi ranah yang bisa dikaji atau tidak, sebab untuk persoalan seperti ibadah dan akidah atau yang dikenal dalam agama sebagai *al-ma'lum min al-din bi al-dharurah*. Kebebasan berpendapat ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad yang menyatakan

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: Kalian lebih tahu tentang perkara yang berkaitan dengan masalah kehidupan duniawi kalian. (HR. Muslim)²¹.

Hadis ini menegaskan kebebasan pembahasan dalam bermusyawarah dalam Islam untuk masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, siapa saja bisa memberikan pendapat dan bebas dalam berpartisipasi mengenai urusan kemaslahatan dunianya terutama masalah yang berkaitan dengan hajat orang banyak.

Hal ini memiliki kesamaan dengan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi sebagaimana prinsip demokrasi, hanya saja perbedaannya, dalam demokrasi liberal tidak ada pembatasan dalam pembahasan berbagai hal, sementara kebebasan pembahasan dalam bermusyawarah sebagaimana diajarkan al-Qur'an memiliki batasan yang memang tidak termasuk ranah kemampuan manusia untuk membahasnya²².

Pada saat yang sama prinsip musyawarah juga memiliki relevansi dengan penghargaan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas demokrasi karena dalam bermusyawarah tidak dibatasi siapa saja yang menjadi subjek pemilih maupun subjek yang harus dipilih, siapa saja bisa

²⁰ Rumni Hafizah and Johari Jamal, "Prespektif Demokrasi Dalam Al-Qur'an ; Fondasi Keadilan Dan Pemikiran Partisipatif," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 81-93.

²¹ Muslim bin Hajjaj Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.). H. 1836.

²² Sinta Amelia Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1 (2022): 238-46.

berpartisipasi dalam penentuan pemimpin²³. Dalam praktik awal pemerintahan Islam pun Nabi Muhammad tidak memilih atau menentukan langsung siapa yang menjadi suksesor beliau ketika beliau meninggal dunia, sehingga para sahabat memahami hal itu sebagai kesempatan untuk memilih sesuai dengan kehendak mereka. Tidak ada perbedaan antara yang berkebangsaan Arab dengan yang non Arab, tidak ada perbedaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan warna kulit, bahkan tidak dibedakan antara yang budak dengan yang bukan budak, semua memiliki kesempatan yang sama²⁴.

Standar pembedanya hanyalah kualitas ketakwaan, yang dalam bahasa lain bisa disebut dengan orang yang paling amanah dan paling bertanggungjawab, atau dalam istilah demokrasinya masuk dalam prinsip kompetensi. Ketakwaan menjadi barometer tertinggi kebaikan seseorang, karena tidak hanya baik dilihat dari sisi kulit luarnya saja, tetapi kebaikan yang terpancar darinya bersumber dari kebaikan yang alami, murni dari dirinya, dan murni untuk Tuhannya, bukan dilandasi motivasi terselubung untuk kepentingan diri dan golongannya, atau demi kepentingan-kepentingan duniawi lainnya²⁵.

Demikian juga dengan prinsip keadilan yang sama-sama menjadi pilar utama baik dalam kepemimpinan Qur'ani maupun dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam istilah al-Qur'an kata *al-adlu* (adil) berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kebalikan dari kata *zhalim* yang berarti menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya. Makanya, kekufuran disebut sebagai kezhaliman yang paling besar,

²³ Wahyu Putri Hasanah, Toni Harsan, and Ika Murtiningsih, "Penerapan Kebebasan Berpendapat Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Karang Taruna Sekar Dwipa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 3 (2023): 404–14.

²⁴ Fachrur Razi Amir, "PENDIDIKAN NILAI PERSPEKTIF AL-QUR'AN VALUE EDUCATION WHICH IS BASED ON AL-QUR'AN," *Tadbir Muwahhid*, 2017, 154–65.

²⁵ Ahmad Ridhoni and Idham Halid, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar : Studi Tentang Keseimbangan Antara Profesionalitas Dan Spiritualitas," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidiplin* 3, no. 1 (2026): 267–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.491>.

karena menempatkan yang bukan tuhan sebagai tuhan, dan Tuhan yang benar (haq) tidak dijadikan sebagai Tuhan yang patut dipertuhankan²⁶. Sementara adil dalam perspektif sistem demokrasi lebih ke makna pemerataan dan tidak diskriminatif dalam berbagai hal yang bersifat lahiriyah pada setiap dimensi kehidupan, dalam hukum, ekonomi, keadilan sosial, dan lain sebagainya²⁷.

Titik temu antara prinsip-prinsip Qur'ani dengan prinsip-prinsip demokrasi terkait dengan pemilihan pemimpin akan menghasilkan sistem demokrasi yang memiliki nilai-nilai etika berlandaskan al-Qur'an, bukan saling mengenyampingkan apalagi sampai memarginalkan, perpaduan keduanya akan menghasilkan integrasi yang saling melengkapi, yaitu partisipasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip musyawarah, pemerintahan yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, dan pemimpin yang akuntabel (berkualitas)²⁸. Hal ini yang menjadi implikasi nyata dari penelitian ini terhadap tata kelola pemerintahan yang merupakan bagian dari kontribusi nilai-nilai Qur'ani, sehingga bisa menjadi landasan beretika politik bagi masyarakat muslim modern.

Epilog

Al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip dasar pemilihan pemimpin yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern yang menganut sistem demokrasi dalam bidang politik dan pemerintahan. Prinsip musyawarah, keadilan, bertanggung jawab, dan amanah secara normatif-etis memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berupa kebebasan berpendapat, keadilan, tanggung jawab, dan kompeten.

²⁶ Afifa Rangkuti and Sesungguhnya Allah Maha, "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 1–21.

²⁷ D A N Utilitarianisme and Dalam Upaya, "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12.

²⁸ Journal Islamic Education et al., "POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN," *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 54–61.

Dalam tataran praktis nilai-nilai ini menjadi landasan etika masyarakat muslim modern dalam menjalankan roda pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Al-Bantani, Nawawi. *Marah Labid*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. I. Kairo: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Al-Nisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Sya'rawi*. I. Kairo: Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997.
- Alhabsyi, M Habib. "Relevansi Ayat-Ayat Politik Al- Qur ' an Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5620–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>.
- Amir, Fachrur Razi. "PENDIDIKAN NILAI PERSPEKTIF AL-QUR ' AN VALUE EDUCATION WHICH IS BASED ON AL-QUR ' AN." *Tadbir Muwahhid*, 2017, 154–65.
- Education, Journal Islamic, Noor Ainah, Universitas Lambung Mangkurat, and Journal Islamic Education. "POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN." *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 54–61.
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1 (2022): 238–46.
- Hafizah, Rumni, and Johari Jamal. "Prespektif Demokrasi Dalam Al-Qur ' an ; Fondasi Keadilan Dan Pemikiran Partisipatif." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 1 (2024): 81–93.
- Hanif, Muhammad, and Abdillah Lubis. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshari." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 177–86. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii%0AKonsep>.
- Hasanah, Wahyu Putri, Toni Harsan, and Ika Murtiningsih. "Penerapan Kebebasan Berpendapat Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai

- Demokrasi Dalam Karang Taruna Sekar Dwipa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 3 (2023): 404–14.
- Iskandar, Rudi. “NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN AYAT-AYAT AL- QUR ’ AN TENTANG PRINSIP DAN TUJUAN KENEGARAAN The State from an Islamic Perspective: A Study of Qur ’ Anic Verses o n The Principles and Objectives of State Governance.” *Ta’limuna Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2025): 156–64.
- Katsir, Abul Fida’ Ismail bin Amr bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008.
- Panjaitan, Ilham Bastanta, Ilma Aulia, Mitha Ratu Apriliani, and Asep Abdul. “ISLAM DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN: ANALISIS TAFSIR MAUDHU ’ I.” *ALMAHER Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2024): 61–75. <https://doi.org/10.63018/jpi.v2i01.31> ISLAM.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal Al-Qur’an*. 17th ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 1992.
- Rangkuti, Afifa, and Sesungguhnya Allah Maha. “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 1–21.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: al-Haiah al-Mishriyah al-Amah li al-Kitab, 1990.
- Ridhoni, Ahmad, and Idham Halid. “Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar: Studi Tentang Keseimbangan Antara Profesionalitas Dan Spiritualitas.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidiplin* 3, no. 1 (2026): 267–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.491>.
- Simamora, Mauzah Hasanah, Jelita Simbolon, and Lutfi Kurmia Wildani. “ANALISIS KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN: KAJIAN TEMATIK TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG PEMIMPIN IDEAL PENDAHULUAN Manusia Sebagai Makhluk Sosial , Tidak Dapat Hidup Sendiri . Dalam Kehidupannya , Manusia Senantiasa Berinteraksi Dengan Sesama.” *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran & Tafsir* 7, no. 2 (2024): 208–26. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>.
- Su, Fatkhiyatus, Ahmad Royhan, Universitas Kh, and Abdul Chalim. “Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam

- Politik Islam Di Indonesia PENDAHULUAN Demokrasi Telah Lama Menjadi Fondasi Penting Dalam Struktur Politik Dan Sosial Di Banyak Negara Barat , Terlebih Di Indonesia Yang Berasas Pancasila . Demokr.” *Syariah Journal of Fiqh Studies* 0, no. 0 (2024): 178–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.61570/syariah>.
- Taufik, Muhammad, and Ardillah Abu. “Islam Dan Demokrasi.” *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (n.d.): 1–14.
- Thanthawi, Sayyid. *Tafsir Al-Wasith*. I. Kairo: Dar Nahdhah Misr, 1997.
- Utilitarianisme, D A N, and Dalam Upaya. “Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12.
- Wulandari, Adjeng, Ananda Hierofani Ahmad, and Universitas Islam Bandung. “PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM AL-QUR’AN II R.” *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern Jurnal Transformasi Pendidikan Modern* 7, no. 1 (2026): 1–16. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jtpm>.